

**ANALISIS KONDISI KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH OTONOMI KHUSUS:  
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA,  
PAPUA BARAT, DAN ACEH**

**INTISARI**

**Tujuan** - Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi penerima dana otonomi khusus berdasarkan indikator yang terukur secara komprehensif.

**Metode Penelitian** – Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) penerima dana otonomi khusus tahun 2017–2021.

**Temuan** – Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemerintah daerah provinsi yang menerima dana otonomi khusus memiliki kondisi keuangan dengan kategori “Cukup”. Kondisi ini terlihat pada setiap rasio solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas, keuangan, solvabilitas layanan, dan solvabilitas operasional yang memiliki nilai rata-rata yang sebagian besar pemda berada pada tingkat kondisi keuangan yang “Cukup”. Hasil identifikasi karakteristik kondisi keuangan IKK tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa pemda dengan jumlah penduduk yang relatif kecil memiliki kondisi keuangan yang baik. Tingginya tingkat efisiensi keuangan, biaya barang dan jasa, dan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum mendorong kondisi keuangan pemerintah menjadi lebih baik. Kepadatan penduduk yang relatif rendah memiliki kondisi keuangan yang baik, sedangkan karakteristik profil umur masyarakat tidak memengaruhi kondisi keuangan pada pemerintah daerah provinsi yang menerima dana otonomi khusus.

**Orisinalitas** – Penelitian ini memberikan gambaran dan hasil analisis mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi penerima dana otonomi khusus dengan menggunakan model analisis kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).

**Kata Kunci:** Kondisi keuangan pemerintah daerah, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas, keuangan, solvabilitas layanan, dan solvabilitas operasional.

**ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION**

**SPECIAL AUTONOMOUS REGIONAL GOVERNMENT:  
CASE STUDY ON PAPUA PROVINCIAL GOVERNMENT,  
WEST PAPUA, AND ACEH**

**ESSENCE**

**Purpose** - The purpose of this research is to analyze the financial condition of provincial governments receiving special autonomy funds based on comprehensive measurable indicators.

**Research Method** - This research method uses a qualitative approach with a descriptive design and uses secondary data in the form of Audit Result Reports (LHP) of the Supreme Audit Agency (BPK) on Regional Government Financial Reports (LKPD) receiving special autonomy funds for 2017 - 2021.

**Findings** - The findings of this research show that overall provincial governments that receive special autonomy funds have financial conditions in the "Adequate" category. This condition can be seen in each ratio of short-term solvency, long-term solvency, budget solvency, financial independence, flexibility, finance, service solvency and operational solvency which have an average value where the majority of local governments are at the "Adequate" level of financial condition. The results of identifying the characteristics of the highest and lowest IKK financial conditions show that regional governments with relatively small populations have good financial conditions. The high level of financial efficiency, the cost of goods and services, and the general level of community prosperity encourage the government's financial condition to improve. A relatively low population density means good financial conditions, while the age profile characteristics of the community do not influence the financial conditions of provincial governments that receive special autonomy funds.

**Originality** – This research provides an overview and results of analysis regarding the financial condition of provincial governments receiving special autonomy funds using the financial condition analysis model developed by Ritonga (2014).

**Keywords:** Regional government financial condition, short-term solvency, long-term solvency, budget solvency, financial independence, flexibility, finance, service solvency, and operational solvency.